

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

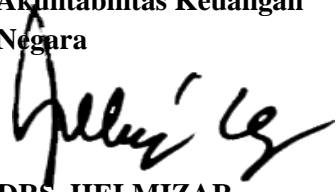
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi II terdapat 12 entitas, 1 entitas yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDT) yakni KPU dan 11 (ANRI, BKN, Bawaslu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Negara, LAN, Ombudsman, dan Sekretaris Kabinet) entitas sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total anggaran belanja mitra Komisi II sebesar Rp21.167.299.303.330,- dan realisasi belanja sebesar Rp16.774.460.649.953.- Total Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) pada Mitra kerja Komisi II tahun 2016 sebesar Rp2.734.664.692.469.- Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi II terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp29.949.170.000.-, potensi kerugian sebesar Rp1.561.130.000,- dan kurang penerimaan sebesar Rp4.525.390.000.-

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi II untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi II sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian  
Akuntabilitas Keuangan  
Negara**



**DRS. HELMIZAR**

**NIP. 19640719 199103 1 003**

## Daftar isi

1.	Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	Telaahan Kementerian.....	1
<b>3.1.</b>	<b>Arsip Nasional (ANRI).....</b>	
3.1.1.	Gambaran Umum.....	1
3.1.2.	Daftar Temuan.....	3
3.1.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	7
<b>3.2.</b>	<b>Badan Kepegawaian Negara (BKN).....</b>	
3.2.1.	Gambaran Umum.....	9
3.2.2.	Daftar Temuan.....	11
3.2.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	13
3.2.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	15
<b>3.3.</b>	<b>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).....</b>	
3.3.1.	Gambaran Umum.....	17
3.3.2.	Daftar Temuan.....	19
3.3.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	21
3.3.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	23
<b>3.4.</b>	<b>Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN.....</b>	
3.4.1.	Gambaran Umum.....	25
3.4.2.	Daftar Temuan.....	27
3.4.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	29
3.4.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	33
<b>3.5.</b>	<b>Kementerian Dalam Negeri.....</b>	
3.5.1.	Gambaran Umum.....	37
3.5.2.	Daftar Temuan.....	39
3.5.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	41
3.5.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	43
<b>3.6.</b>	<b>Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).....</b>	
3.6.1.	Gambaran Umum.....	47
3.6.2.	Daftar Temuan.....	49
3.6.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	51
3.6.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	57

<b>3.7.</b>	<b>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN/RB).....</b>	
3.7.1.	Gambaran Umum.....	65
3.7.2.	Daftar Temuan.....	67
3.7.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	69
3.7.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	71
<b>3.8.</b>	<b>Kementerian Sekretaris Negara (Sesneg).....</b>	
3.8.1.	Gambaran Umum.....	73
3.8.2.	Daftar Temuan.....	75
3.8.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	77
3.8.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	79
<b>3.9.</b>	<b>PD TT BA 999.08 Pada Kemensesneg.....</b>	
3.9.1.	Gambaran Umum.....	81
3.9.2.	Daftar Temuan.....	83
3.9.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	85
3.9.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	89
<b>3.10.</b>	<b>Komisi Pemilihan Umum (KPU).....</b>	
3.10.1.	Gambaran Umum.....	89
3.10.2.	Daftar Temuan.....	91
3.10.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	93
3.10.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	99
<b>3.11.</b>	<b>Lembaga Administrasi Negara (LAN).....</b>	
3.11.1	Gambaran Umum.....	100
3.11.2	Daftar Temuan.....	103
3.11.3	Sistem Pengendalian Intern.....	105
3.11.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	107
<b>3.12.</b>	<b>Ombudsman Republik Indonesia (ORI).....</b>	
3.12.1	Gambaran Umum.....	109
3.12.2	Daftar Temuan.....	111
3.12.3	Sistem Pengendalian Intern.....	113
<b>3.13.</b>	<b>Sekretaris Kabinet (Seskab).....</b>	
3.13.1.	Gambaran Umum.....	115
3.13.2.	Daftar Temuan.....	117
3.13.3.	Sistem Pengendalian Intern.....	119
3.13.4.	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	123
	<b>Lampiran.....</b>	<b>125</b>

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN ARSIP NASIONAL RI (ANRI) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK ANRI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK ANRI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WDP

2015  
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

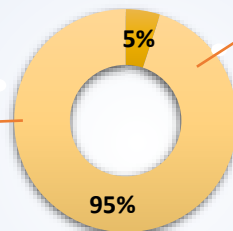
## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 14.800.974.455,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 180.652.468.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 159.303.357.900,00 (88%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 425.518.949.455,00
- **Kewajiban**  
Rp 3.407.855.097,00
- **Ekuitas**  
Rp 422.111.094.833,00

**Kepatuhan  
Perundang-undangan  
3 Temuan**



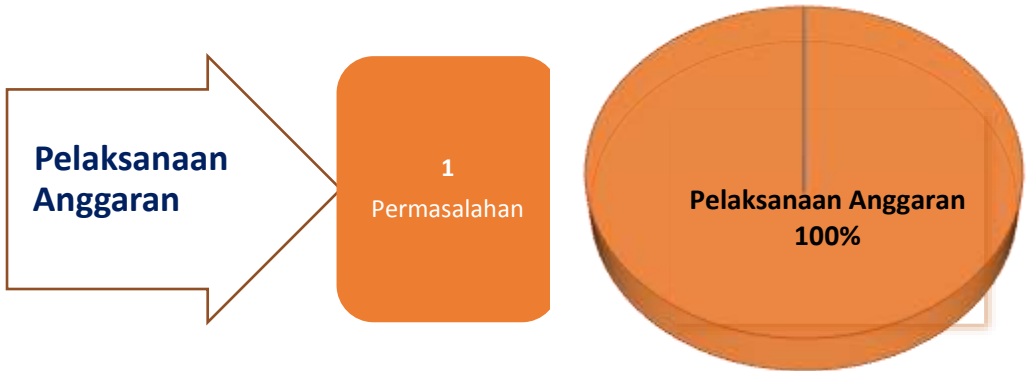
**Sistem Pengendalian Intern**

**1 Temuan**

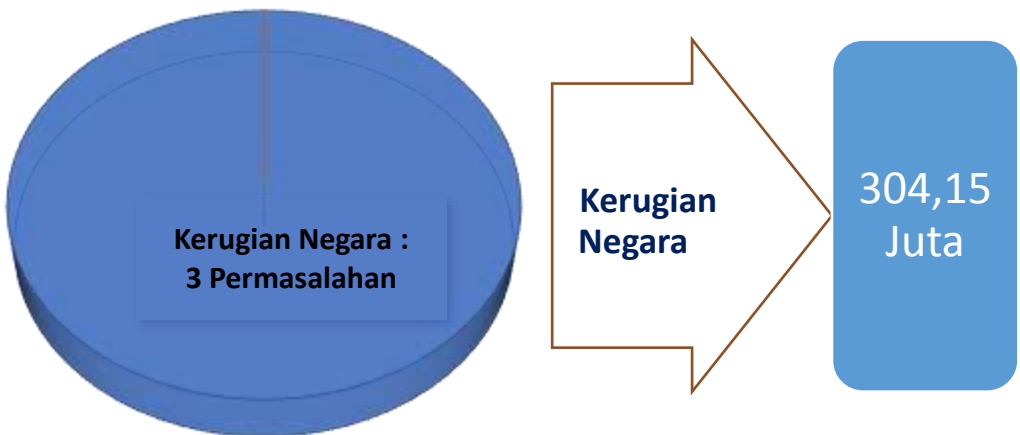


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK ANRI tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Terdapat Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan ANRI pada Belanja Barang yang digunakan untuk perolehan dan pengembangan Aset senilai Rp753,25 juta.
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Terdapat Pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp56,55 juta.
2.2	Terdapat Penatausahaan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp215,07 juta.
2.3	Terdapat Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp32,53 juta.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang terkait dengan mitra kerja Komisi II, yaitu temuan SPI nomor 1 dan temuan Kepatuhan nomor 2.



# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BKN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BKN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 1.675.708.025,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 562.235.563.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 521.675.105.046,00 (92,79%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 1.113.536.527.976,00
- **Kewajiban**  
Rp 1.492.060.179,00
- **Ekuitas**  
Rp 1.112.044.467.797,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 3 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 413.770.000,00
- Potensi Kerugian  
Rp 124.000.000,00



60%

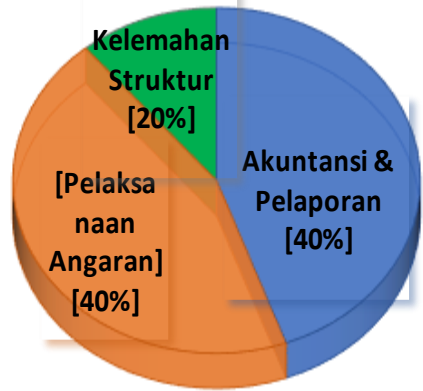
40%

Sistem Pengendalian Intern  
6 Temuan

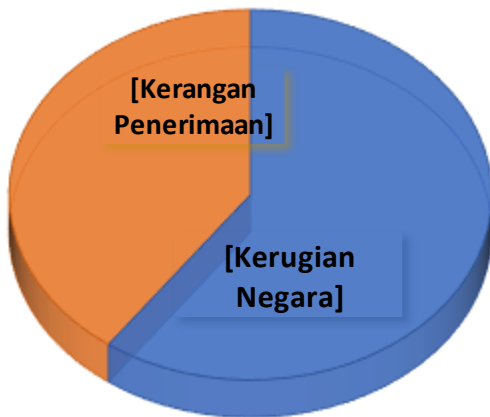


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK BKN tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem Pengendalian Pendapatan terdapat Pungutan Sewa dari Penggunaan Wisma Kantor Regional III BKN Bandung Belum Memiliki Dasar Hukum dan Pengelolaannya Belum Tertib
1.2	Sistem Pengendalian Belanja terdapat Kesalahan Penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal
1.3	Kesalahan Penganggaran Akun Belanja Barang yang Menghasilkan Persediaan.
1.4	Sistem Pengendalian Aset terdapat Pencatatan dan Pelaporan Persediaan di Kanreg III BKN Bandung dan Kantor Pusat BKN Belum Tertib
1.5	Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Belum Tertib
1.6	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Belum Tertib
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas rapat luar kota sebesar Rp64.680.000
2.2	Pertanggungjawaban Biaya Pemeliharaan Kendaraan tidak sesuai dengan dokumen yang sebenarnya sebesar Rp39.500.000 juta
2.3	Kekurangan volume pekerjaan sebelas kegiatan Belanja Modal sebesar Rp309.590.000

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang bersifat signifikan dan menyangkut kerugian negara. Berdasarkan telaah LHP BPK, Temuan pada ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang menyebabkan kerugian negara pada poin 2.2 dan 2.3 sudah ditindak lanjuti dengan penyeteroran ke Kas Negara sebesar masing-masing temuan tersebut. sehingga yang akan ditelaah lebih lanjut pada temuan SPI No. 1.1 dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan No. 2.1:

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK BAWASLU dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BAWASLU dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WDP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 4.821.505.663,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 1.712.992.952.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 1.030.902.586.725,00 (60,18%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 423.696.668.054,00
- **Kewajiban**  
Rp 6.080.157.487,00
- **Ekuitas**  
Rp 417.616.510.567,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 3 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 1.489.420.000,00



60%

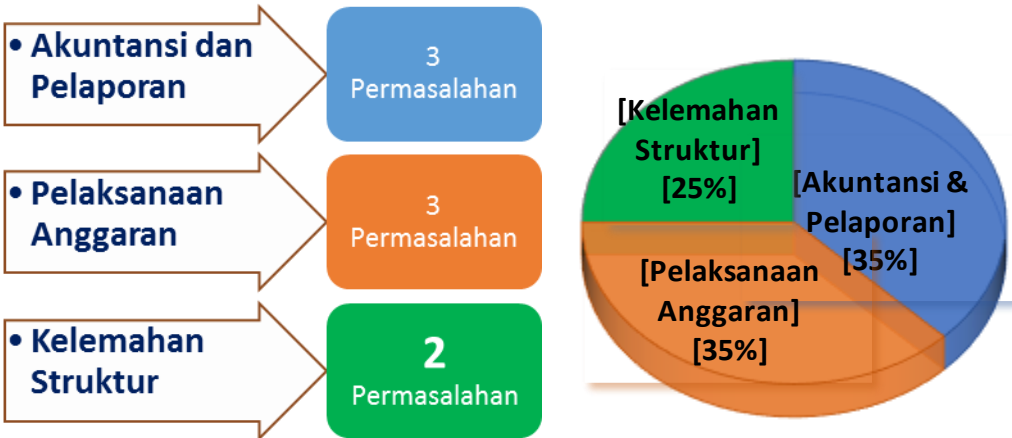
40%

## Sistem Pengendalian Intern 6 Temuan

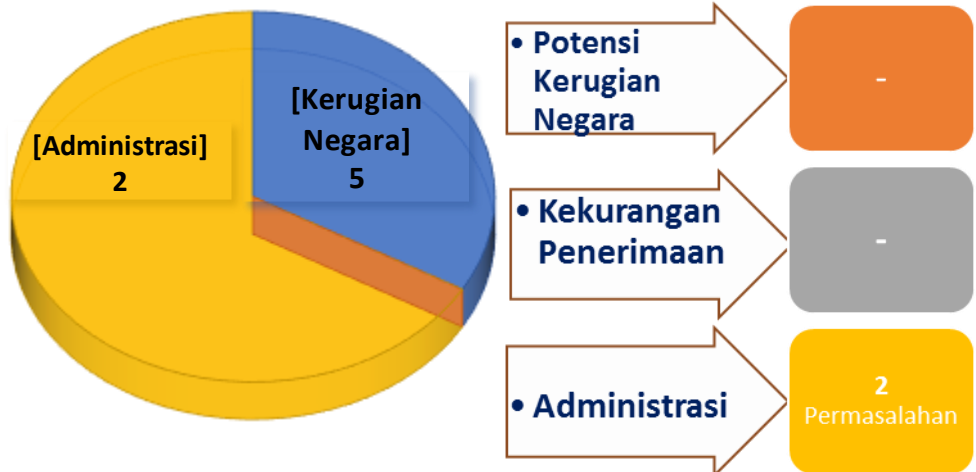


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK Bawaslu tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TEMUAN
1	<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>
1.1	Penatausahaan kas di bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu belum tertib
1.2	Penatausahaan dan pelaporan kas lainnya dan setara kas belum tertib
1.3	Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Belum Tertib
1.4	Penatausahaan aset tetap pada Bawaslu belum tertib
1.5	Barang Milik Negara (BMN) pada satker BAWASLU pusat tidak diketahui keberadaannya senilai Rp93.960.000
1.6	Belanja Barang sebesar Rp1.310.000.000 digunakan untuk Pengadaan Aset Tetap dan Belanja Pemeliharaan digunakan untuk Pengadaan Barang Persediaan sebesar Rp123.590.000
2	<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
2.1	Penyetoran sisa Dana Hibah Pilkada Serentak tahun 2015 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.270.000.000 (1,27 milyar)
2.2	Terdapat sisa kas bulan September tahun 2016 dan utang pajak yang belum disetorkan oleh mantan kepala sekretariat panitia pengawas pemilu Kota Tangerang Selatan
2.3	Realisasi Belanja Hibah Pilkada belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp298.080.000 (298,08 juta)

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang bersifat signifikan dan menyangkut kerugian negara. Berdasarkan telaah LHP BPK, sehingga yang akan ditelaah lebih lanjut pada temuan SPI No. 1.5 menyangkut aset dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan No. 2.1 terkait penatausahaan Dana Hibah:

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ART/BPN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemen ATR/BPN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemen ATR/BPN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 2.111.189.064.300,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 6.027.040.480.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 5.166.677.299.232,00 (85,72%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 6.607.501.122.888,00
- **Kewajiban**  
Rp 330.144.587.320,00
- **Ekuitas**  
Rp 5.177.356.535.568,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 15 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 6.078.210.000,00
- Kekurangan Penerimaan  
Rp 3.027.770.000,00



56%

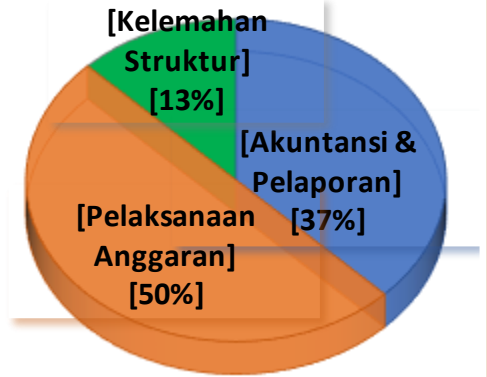
44%

## Sistem Pengendalian Intern 7 Temuan

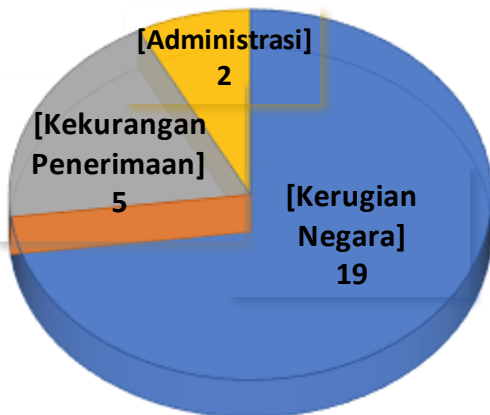


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan





Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pegendalian pendapatan terdapat Pendapatan Hak dan Perizinan sebesar Rp9.020.000.000 (9,02 miliar) dan Pendapatan Jasa Lainnya sebesar Rp5.850.000.000 (5,85 miliar) tidak didukung dokumen yang memadai
1.2	Pengendalian pendapatan terdapat kelemahan dalam Aplikasi KKP dan ketidaktertiban atas penggunaannya
1.3	Pengendalian belanja terdapat kesalahan mengaggarkan Belanja yang menghasilkan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud menggunakan Belanja Barang sebesar Rp7.520.000.000 (7,52 miliar)
1.4	Kesalahan mengaggarkan Belanja Barang yang menghasilkan Persediaan pada MAK 521211
1.5	Pengendalian aset terdapat penatausahaan persediaan yang belum memadai
1.6	Pengendalian aset dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) belum dilaksanakan secara memadai
1.7	Inventarisasi dan Penghapusan BMN belum dilaksanakan secara memadai
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja pada Belanja Pegawai bulan Desember 2016 sebesar Rp2.250.000.000 (2,25 miliar)
2.2	Kelebihan pembayaran Uang Makan pegawai pada Kantah Kota Semarang sebesar Rp1.960.000 (1,96 juta)
2.3	Kelebihan pembayaran kontrak Belanja Barang atas delapan (8) pekerjaan senilai Rp1.220.000.000 (1,22 miliar) dan Denda Keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp48.170.000 (48,17 juta)
2.4	Proses pengadaan barang dan jasa pada tujuh (7) Satker tidak sesuai dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.5	Kelebihan honorarium pada sepuluh (10) Satker sebesar Rp929.510.000 (929,51 juta) dan Pemborosan keuangan negara pada dua (2) Satker sebesar Rp4.590.000.000 (4,59 miliar)

2.6	Pembayaran Uang Saku RDK pada tiga (3) Satker di Kementerian ART/BPN tidak sesuai SBM sebesar Rp110.770.000 (110,77 juta) dan tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp571.500.000 (571,50 juta)
2.7	Kelebihan pembayaran belanja Perjalanan Dinas pada 26 Satker sebesar Rp787.500.000 (787,50 juta) dan Pemborosan keuangan negara sebesar Rp150.000.000 (150,00 juta)
2.8	Belanja barang tidak dilaksanakan sebesar Rp91.060.000 (91,06 juta) pada Satker Kantor Pusat Ditjen Pengendalian dan Satker Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Timur
2.9	Penyusunan DED ruang kerja atas bangunan dan gedung yang bukan aset milik sendiri oleh Satker Sekretariat Ditjen Tata Ruang tidak tepat
2.10	Pekerjaan pembangunan gedung Kantah Kota Administratif Jakarta Utara tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan belum dikenakan minimal sebesar Rp2.770.000.000 (2,77 miliar)
2.11	Kelebihan pembayaran belanja modal dan kekurangan pekerjaan renovasi gedung kantor pada beberapa Satker sebesar Rp497.160.000 (497,16 juta)
2.12	Pengadaan Barang/Jasa pada beberapa Satker tidak sesuai ketentuan
2.13	Pengadaan kendaraan operasional roda empat pada Kanwil BPN Propinsi Kaltim dan Kantah Kab. Kutai Kartanegara jenis SUV tidak sesuai peruntukan
2.14	Penyusunan HPS pekerjaan kontruksi pembangunan gedung Pusdiklat Tahap IV kurang memadai dan kelebihan pembayaran sebesar Rp169.930.000
2.15	Proses pemilihan penyediaan barang peralatan dan mesin pada Kantah Kota Samarinda dengan pembelian langsung kepada penyedia barang tanpa melalui pengadaan langsung tidak tepat

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan LK Kemen ATR/BPN yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **1.2** dan **1.3**. Sedangkan untuk kepatuhan peraturan perundang-undangan adalah temuan no **2.1** dan **2.5**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Kemendagri dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kemendagri dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP-DPP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 78.040.571.650,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 3.774.080.320.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 2.860.184.963.672,00 (75,78%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 6.285.509.348.494,00
- **Kewajiban**  
Rp 14.615.017.435,00
- **Ekuitas**  
Rp 6.270.894.331.059,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 17 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 15.929.210.000,00
- Kekurangan Penerimaan  
Rp 203.380.000,00



47%

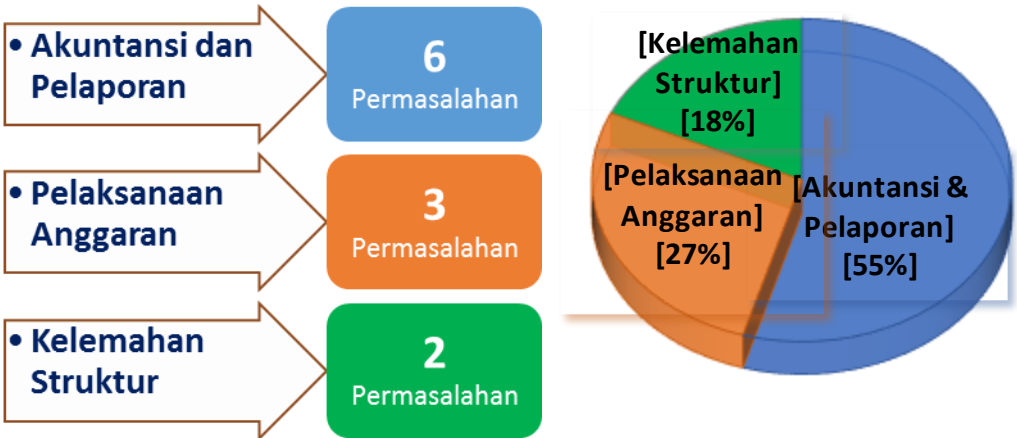
53%

## Sistem Pengendalian Intern 10 Temuan

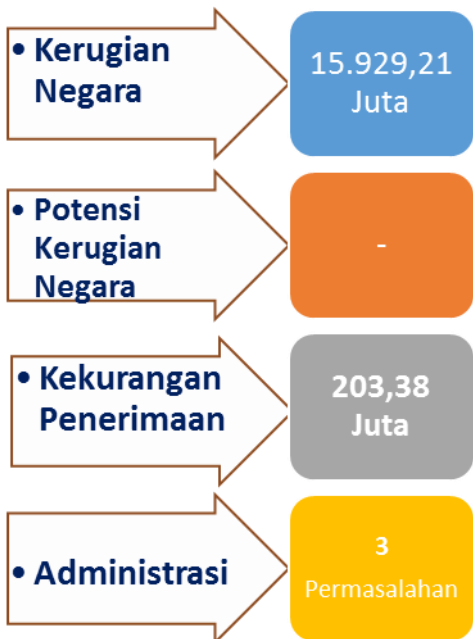
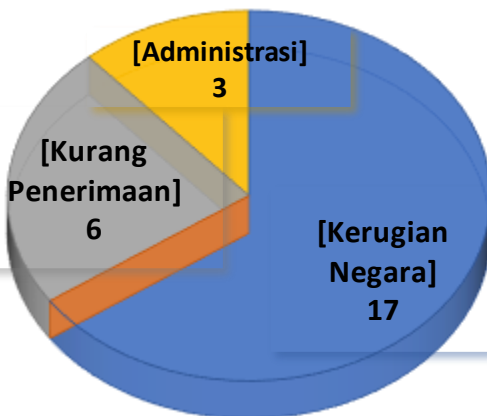


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK Kemendagri tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	<b>SISTEM PENGENDALIAN INTERN</b>
1.1	Pengelolaan belanja gaji tidak tertib
1.2	Proses pengadaan jasa konsultasi tidak sesuai ketentuan
1.3	Pengelolaan Kas pada BP dan BPP belum tertib
1.4	Pengelolaan Kas di bendahara penerimaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Pascasarjana tidak tertib
1.5	Penerimaan piutan PNBPN tidak tertib
1.6	Penatausahaan persediaan belum memadai
1.7	Penatausahaan aset tetap tidak memadai
1.8	Perhitungan akumulasi penyusutan dalam laporan keuangan belum memadai
1.9	Perhitungan akumulasi Amortisasi ATB pada Setjen belum memadai
1.10	Pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga senilai Rp37.150.688.853 belum dibayarkan.
2	<b>KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>
2.1	Penerimaan PNBPN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri (BPSDM) belum dikenakan pajak sebesar Rp28.278.884,98
2.2	Kas tidak dapat dipertanggungjawabkan pada IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp113.152.237
2.3	Kas tidak dapat dipertanggungjawabkan pada IPDN Kampus Sulawesi Selatan sebesar Rp12.598.712
2.4	Dokumen pertanggungjawaban kegiatan untuk penyelesaian kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada BPSDM tidak sesuai ketentuan sebesar RP526.462.050 dan belanja tidak sebenarnya sebesar Rp64.594.000

2.5	Kelebihan pembayaran belanja bahan sebesar Rp5.396.396.760,76 dan Pajak yang belum dipungut sebesar Rp19.548.795,17
2.6	Kelebihan pembayaran Honorarium Narasumber/Moderator, Tim Kegiatan/ Output dan honorarium lainnya sebesar Rp4.586.034.255,14
2.7	Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personil (BLP) dan Biaya Langsung Non Personil (BLNP) atas pekerjaan jasa konsultan sebesar Rp202.541.920
2.8	Kelebihan pembayaran uang saku rapat dalam kantor sebesar Rp383.580.000
2.9	Kelebihan pembayaran uang saku dan uang transport kegiatan paket <i>meeting</i> sebesar Rp240.340.050 dan belum dikenai pajak sebesar Rp19.627.500
2.10	Kelebihan pembayaran Belanja Lembur sebesar Rp229.256.150
2.11	Kelebihan pembayaran belanja paket <i>meeting</i> dalam/luar kota sebesar Rp27.220.000
2.12	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp2.585.469.648
2.13	Kelebihan pembayaran Belanja Pemeliharaan sebesar Rp508.422.419,84
2.14	Kelebihan pembayaran Belanja Barang lainnya sebesar Rp995.001.611,12
2.15	Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp34.623.436,47 dan Denda keterlambatan sebesar Rp6.238.134
2.16	Pemahalan harga sebesar Rp122.487.500
2.17	Pengadaan tidak sebenarnya sebesar Rp14.249.356

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kementerian Dalam Negeri yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut untuk SPI adalah temuan no **1.4**. Sedangkan untuk kepatuhan peraturan perundang-undangan adalah temuan no **2.5** dan **2.6**.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BNPP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP

2015  
WTP


BPK memberikan opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

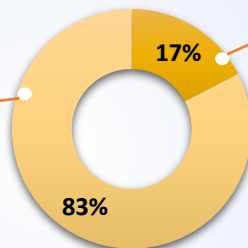
## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 2.688.310.600,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 136.185.443.365,00 (94,81%)
- **Anggaran Belanja**  
Rp 143.641.340.000,00

## NERACA

- **Aset**  
Rp 344.999.826.676,00
- **Kewajiban**  
Rp 77.169.150,00
- **Ekuitas**  
Rp 344.922.657.526,00

 **Kepatuhan  
Perundang-undangan  
8 Temuan**

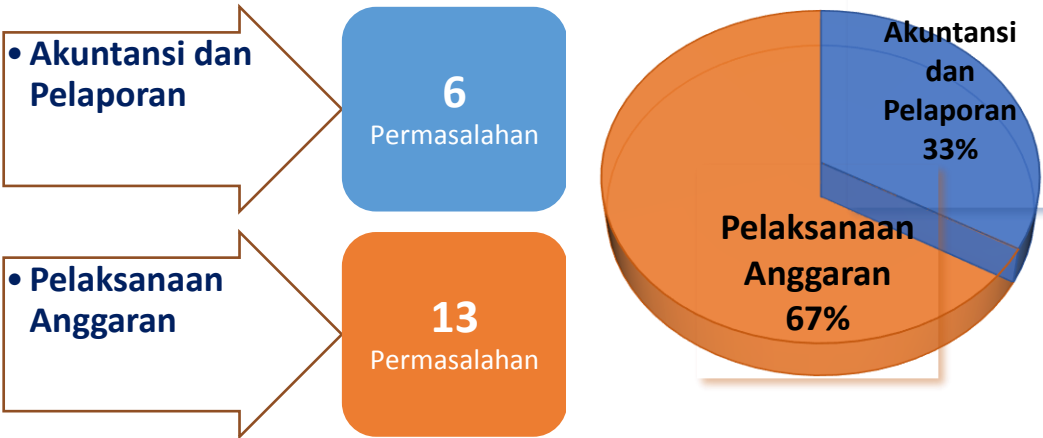


**Sistem Pengendalian Intern  
4 Temuan**

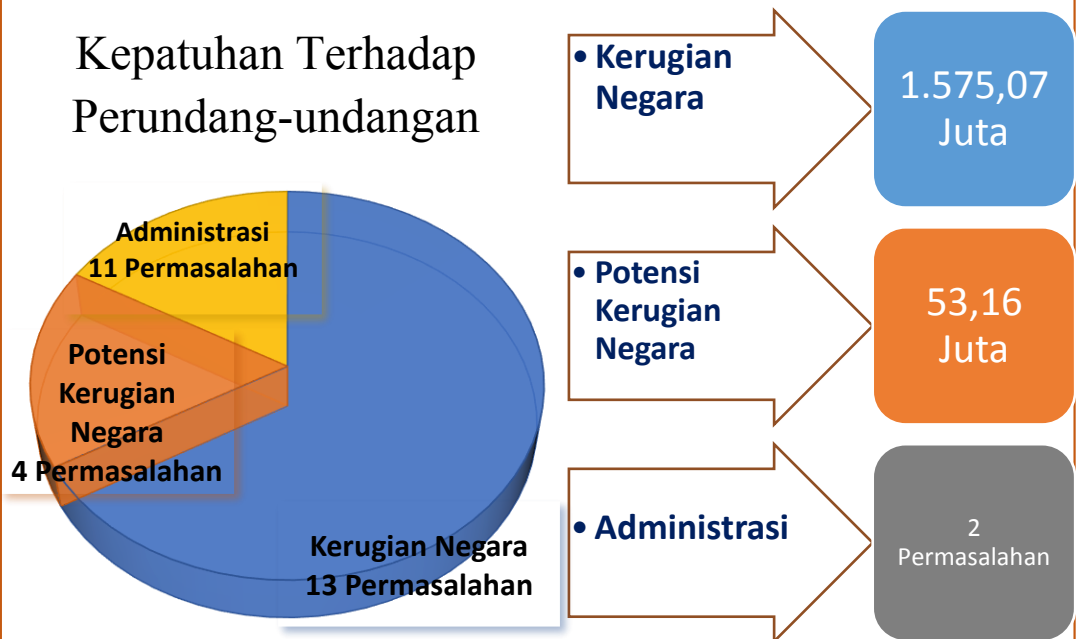


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan





Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK BNPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Internal</b>	
1	Penatausahaan Perpajakan pada BNPP Belum Memadai
2	Aset Tetap BNPP senilai Rp490.097.333,00 pada BPP Kabupaten Belu dikuasai oleh pihak yang tidak berhak
3	BNPP belum menetapkan status penghentian sementara atau permanen atas KDP sebesar Rp11.754.922.708,00
4	Status penggunaan 14 unit perahu senilai Rp729.000.000,00 pada BPP Kabupaten Kepulauan Sangihe belum ditetapkan oleh Pengelola Barang
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pertanggungjawaban Belanja Bahan pada dua satuan kerja(satker) didukung dengan bukti yang tidak benar sebesarRp62.886.200,00
2	Kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi sebesarRp831.938.500,00
3	Kelebihan pembayaran dan pernahalan harga atas realisasiBelanja Peraliharaan sebesar Rp72.148.439,51
4	Pembayaran uang saku dan honor pelaksanaan rapatdalam kantor yang tidak sesuai Standar Biaya Masukan(SBM) sebesar Rp 179.990.000,00
5	Kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas paketmeeting sebesar Rp274.295.300,00
6	Kelebihan pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp153.745.500,00
7	Terdapat kerusakan pembangunan bronjong pengaman pilar batas wilayah negara Desa Lamaksenulu pada MasaPemeriksaan Pekerjaan Sebesar Rp53.165.227,50
8	Verifikasi Berkas Rampung Perjalanan Dinas pada BNPPbelum memadai.

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUAAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK KemanPAN/RB dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK KemPAN/RB dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

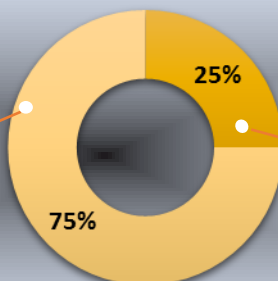
- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 949.940.970,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 180.584.644.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 153.496.632.490,00 (85%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 61586.823.712,00
- **Kewajiban**  
Rp 158.448.261,00
- **Ekuitas**  
Rp 61.428.375.451,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 7 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 312.560.000,00



## Sistem Pengendalian Intern 3 Temuan



# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

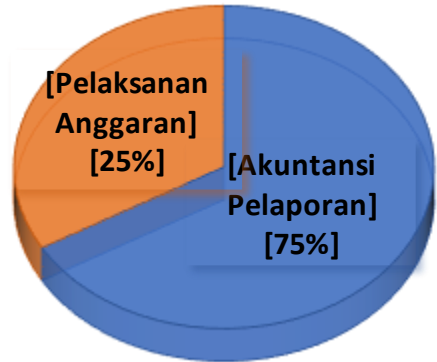
2  
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

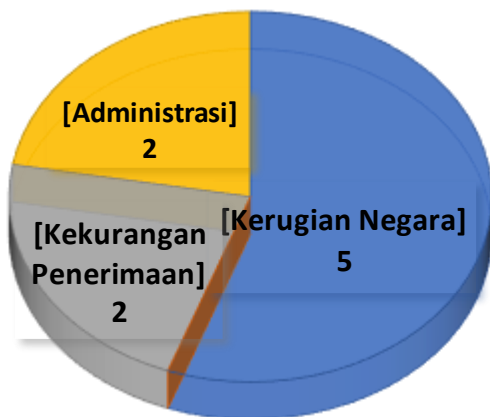
1  
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

Tidak ada  
Permasalahan



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

312,56  
Juta

• Potensi Kerugian Negara

-

• Kekurangan Penerimaan

-

• Administrasi

2  
Permasalahan

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KemenPAN/RB Tahun Anggaran 2016 BPK mencatat terdapat beberapa temuan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pengendalian aset pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian PANRB belum dilaksanakan secara tertib
1.2	Perhitungan nilai penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin pada Kementerian PANRB tidak sesuai dengan PMK Nomor 145/KM.6/2014
1.3	Sistem pengendalian belanja terdapat Pengendalian atas Pengadaan Aplikasi <i>E-Office</i> pada Inspektorat Kementerian PANRB belum memadai
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Terdapat kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa Tunjangan Khusus/Kinerja dan Biaya Lembur di KASN
2.2	Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri tahun 2016 pada Deputi Bidang Pelayanan Publik, Deputi Bidang SDM Aparatur, Inspektorat dan Biro SDM Umum sebesar Rp46.890.000
2.3	Realisasi anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp239.930.000
2.4	Belanja konsultasi dan belanja pemasangan iklan tidak sesuai dengan ketentuan
2.5	Belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan
2.6	Pembayaran belanja barang persediaan barang konsumsi digunakan untuk belanja bahan sebesar Rp203.570.000
2.7	Perhitungan Harga Satuan Negosiasi pada pekerjaan renovasi kantor KASN Tahun 2016 tidak sesuai ketentuan

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang bersifat material, signifikan dan menyangkut kerugian negara. Berdasarkan telaah LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PAN/RB, sehingga yang akan ditelaah lebih lanjut pada temuan SPI No 1.3 tentang pengadaan Aplikasi *E-Office* pada Inspektorat Kementerian PAN/RB belum memadai dan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan No.2.3 Realisasi anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan tidak sesuai peruntukan:

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sekretaris Negara (Sekneg) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Sekneg dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Sekneg dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP-DPP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 414.190.079.422,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 2.640.905.224.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 2.118.997.604.757,00 (80,24%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 4.372.800.476.501,00
- **Kewajiban**  
Rp 40.090.078.851,00
- **Ekuitas**  
Rp 94.232.710.397.650,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 7 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 911.530.000,00
- Kekurangan Penerimaan  
Rp 587.910.000,00

43%

57%

## Sistem Pengendalian Intern 12 Temuan



# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

8

Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

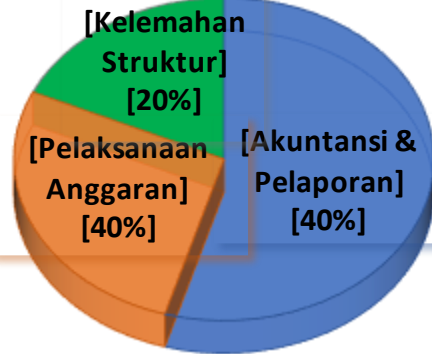
8

Permasalahan

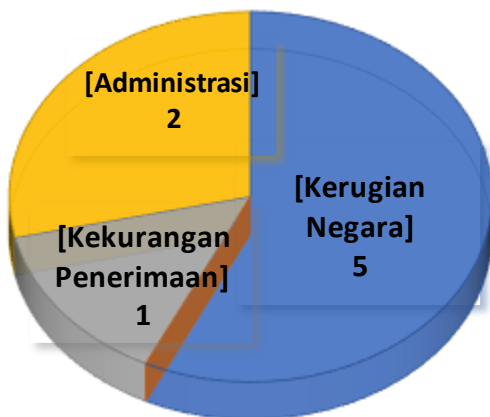
• Kelemahan Struktur

2

Permasalahan



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

911,53  
Juta

• Potensi Kerugian Negara

-

• Kekurangan Penerimaan

587,91  
Juta

• Administrasi

2  
Permasalahan

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LK Kementerian Sekretaris Negara tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pengendalian pendapatan terdapat pengelolaan Piutang dan Pendapatan PPKK belum memadai
1.2	Sistem pengendalian pendapatan pada pengelolaan Piutang dan kegiatan operasional BLU PPKK belum memadai
1.3	Sistem pengendalian belanja pembayaran Pembayaran Insentif Kinerja Kepada Pejabat Pengelola/Pegawai Satker BLU PPKGBK Tidak Berdasarkan Capaian KPI dan Tidak Memperhitungkan Pemotongan atas Ketidakterdisiplinan Kerja
1.4	Pembayaran Honorarium Narasumber Tidak Sepenuhnya mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun 2016
1.5	Pengelolaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Satuan Kerja Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden serta Pengendalian atas Penggunaan Kartu Kredit pada Belanja Kunjungan Kerja Presiden Belum Memadai
1.6	Terdapat Realisasi Belanja Barang Melewati Tahun Anggaran Senilai Rp803.650.000 (803,65 Juta) yang Dibebankan pada Tahun 2016
1.7	Kesalahan Penggunaan Mata Anggaran Keluaran (MAK) Belanja Barang yang Direalisasikan untuk Pemerolehan Aset Tetap Sebesar Rp43.970.000.000 (43,97 Miliar)
1.8	Sistem pengendalian aset Pengelolaan Persediaan pada Sakter di lingkungan Kemensetneg belum tertib
1.9	Aset Tetap Berupa Peralatan Mesin di Gedung Museum Balai Kirti yang Diterima dari Sekreatriat Negara tidak sesuai dengan BAST BMN
1.10	Penyajian Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Neraca pada Satker di Lingkungan Kemensetneg per 31 Desember 2016 Tidak Tepat
1.11	Penyajian Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi di Lingkungan Kemensetneg Tidak Sesuai dengan Buletin Teknis Aset Tetap Akrual
1.12	Penyajian Nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Satker di Lingkungan Kemensetneg Tidak Tepat
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1	Realisasi Belanja Barang Tidak Sepenuhnya Mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2016
2.2	Ketidakhematan Belanja Pemeliharaan Kebersihan pada Satker BLU PPKGBK Sebesar Rp818.400.000 (818,40 Juta)
2.3	Iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada Pekerjaan Pemeliharaan Kebersihan Kurang Disetor Sebesar Rp1.240.000.000 (1,24 Miliar)
2.4	Bukti Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Kondisi yang Sebenarnya Sebesar Rp380.150.000 (380,15 Juta)
2.5	Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi <i>Organisasi Kerja Sama Islam</i> (KTT OKI) dan Konferensi Tingkat Tinggi <i>World Islamic Economic Forum</i> (KTT WIEF) Tidak Memadai
2.6	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Barang Sebesar Rp204.910.000 (204,91 Juta)
2.7	Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Sebesar Rp324.760.000 (324,76 Juta)

Berdasarkan daftar temuan diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan yang menurut BPK memuat pokok-pokok kelemahan Kemensesneg yang material baik dalam SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Temuan yang dibahas lebih lanjut pada temuan SPI No 1.7 tentang kesalahan MAK sebesar 43,97 M dan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan No.2.3 kekurangan setor Iuran BPJS dan pekerjaan pemeliharaan sebesar 1,24M



# HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 999.08 TAHUN ANGGARAN 2016 PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



Dalam rangka memberikan opini atas LK BUN, dilakukan pemeriksaan pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN yang mendapatkan alokasi anggaran dari BA 999.08 pada TA 2016. Pemeriksaan di tingkat KPA BUN merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menilai:

1. Kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan Belanja Lainnya dengan ketentuan perundang-undangan dan tujuan penggunaan Belanja tersebut, dan
2. Pertanggungjawaban pengelolaan Belanja Lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.



Hasil Kesimpulan Pemeriksaan:  
Masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap standar dan ketentuan yang berlaku

## Laporan Realisasi Anggaran

- BA.999.08  
Rp 112.000.000.000
- Realisasi Belanja  
Rp 96.093.636.322,00 (85,8%)

## Realisasi Belanja

- Belanja Set Presiden  
Rp 86.000.000.000,00 (86,00%)
- Belanja Set Wapres  
Rp 10.093.639.322,00 (84,11%)



Kepatuhan  
Perundang-undangan  
**2 Temuan**

50%

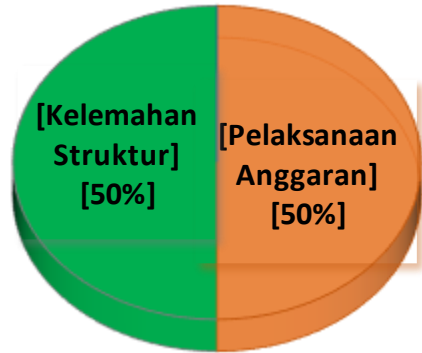
50%

Sistem Pengendalian Intern  
**2 Temuan**

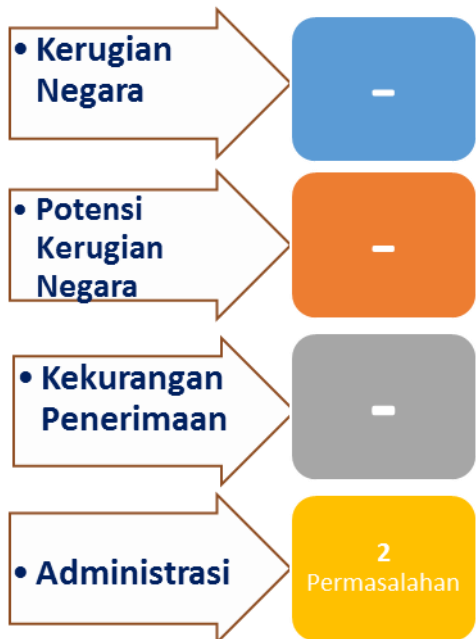


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Kemensetneg pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan anggaran BA 999.08 untuk Belanja Lainnya sebesar Rp112.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.093.639.322,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08, hasil pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08, BPK menyimpulkan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Kategorisasi Bantuan Masyarakat (Banmas) belum memiliki standar
1.2	Pengelolaan Belanja Lain-lain pada Satker Setpres dan Setwapres belum memadai
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Pengeluaran Belanja Lain-Lain pada Satuan Kerja Sekretariat Wakil Presiden belum sesuai ketentuan
2.2	Pembebanan Honor Pengelola BA 999.08 di Setwapres tidak sesuai ketentuan

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang bersifat material, signifikan dan menyangkut kerugian negara. Berdasarkan telaah LHP BPK atas PDDT BA 999.08 pada Kemensetneg, sehingga yang akan ditelaah lebih lanjut pada temuan SPI No 1.2 dan Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan No.2.1 terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban masalah belanja:

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK KPU dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK KPU dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini:  
**Wajar Dengan Pengecualian  
(WDP)**

*Ket: selama 3 tahun berturut-turut capaian opini BPK atas LK KPU mendapat WDP, Hal ini harus menjadi perhatian Komisi II selaku mitra kerja KPU*



## Laporan Realisasi Anggaran

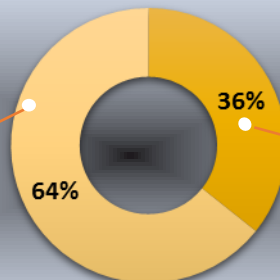
- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 30.147.622.764,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 5.171.022.721.330,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 3.953.739.019.858,00 (69,16%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 3.034.569.158.857,00
- **Kewajiban**  
Rp 260.199.158.074,00
- **Ekuitas**  
Rp 2.774.370.000.783,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 8 Temuan

- **Kerugian Negara**  
Rp 1.676.130.000,00
- **Potensi Kerugian**  
Rp 1.383.970.000,00
- **Kekurangan Penerimaan**  
Rp 661.770.000,00

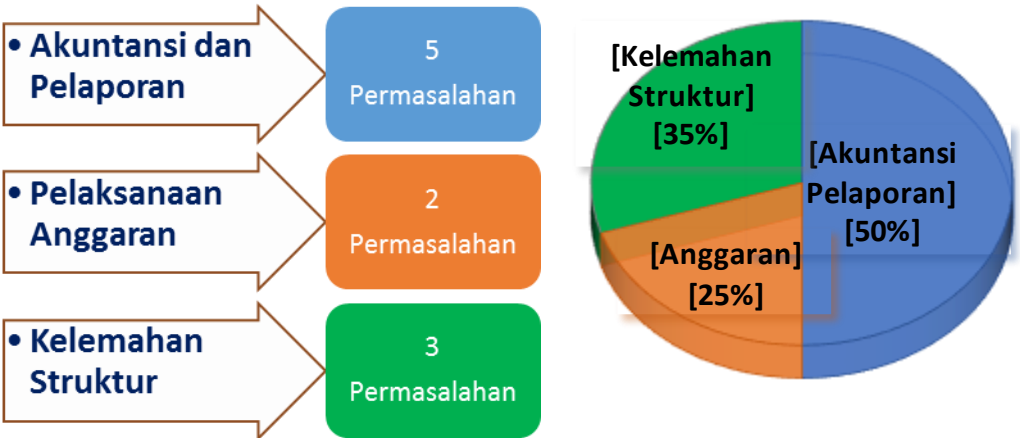


## Sistem Pengendalian Intern 5 Temuan

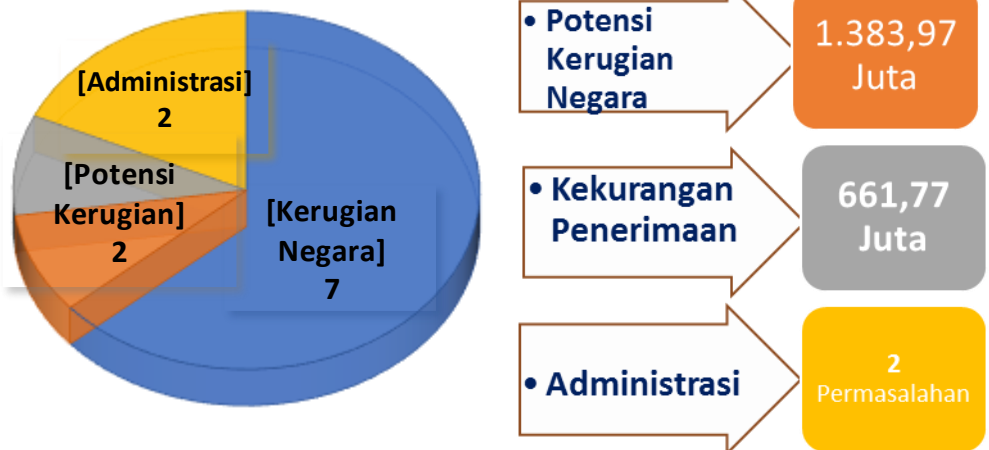


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KPU Tahun Anggaran 2016 BPK mencatat terdapat beberapa temuan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pengendalian penyusunan Laporan Keuangan KPU tidak melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) pada 36 Satker
1.2	Pencatatan dan Pelaporan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi belum memadai
1.3	Proses Penetapan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara tidak sesuai ketentuan
1.4	Pencatatan Barang Persediaan pada lima (5) Satker dan Pembebanan Belanja Barang Persediaan pada empat (4) Satker belum tertib
1.5	Sistem pengendalian hibah terdapat pencatatan dan pelaporan Hibah tahun 2015 tidak memadai
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Perjalanan Dinas pada Satker KPU Pusat tidak sesuai ketentuan senilai Rp822.130.000 (822,13 juta)
2.2	Kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural, Tunjangan Umum, dan Tunjangan Khusus Papua pada delapan (8) Satker di KPU senilai Rp38.200.000 (38,20 juta)
2.3	Terdapat realisasi Belanja Barang yang tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 senilai Rp50.460.000 (50,46 juta), Pajak Penghasilan Pasal 21 senilai Rp140.030.000 (140,03 juta) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp471.270.000 (471,27 juta)
2.4	Pekerjaan jasa sewa layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2016 tidak sesuai ketentuan
2.5	Pembayaran Honorarium Tim Pokja di Sembilan (9) KPU Kabupaten/Kota dan Satu (1) KPU Provinsi tidak sesuai ketentuan
2.6	Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp1.380.000.000 (1,38 miliar) masih dikuasai oleh mantan pejabat dan mantan pegawai KPU
2.7	Barang Milik Negara hilang dan belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya senilai Rp193.120.000 (193,12 juta)
2.8	Terdapat permasalahan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( <i>inkracht</i> ) tetapi belum ditindaklanjuti oleh KPU

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK LAN dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK LAN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 73.390.921.159,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 268.162.463.444,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 268.162.463.444,00 (95,15%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 934.793.651.639,00
- **Kewajiban**  
Rp 4.512.030.100,00
- **Ekuitas**  
Rp 930.281.621.539,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 5 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 58.220.000,00
- Kekurangan Penerimaan  
Rp 23.070.000,00

53%

47%

## Sistem Pengendalian Intern 8 Temuan

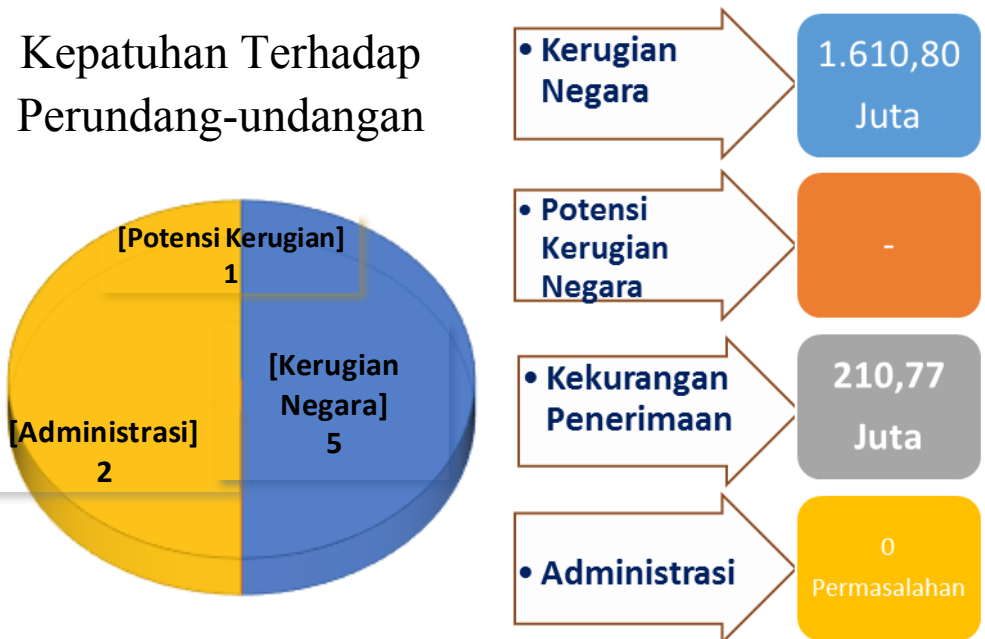


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan





Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan LAN Tahun Anggaran 2016 BPK mencatat terdapat beberapa temuan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pengendalian belanja terdapat kesalahan penganggaran dan realisasi belanja modal dan belanja barang
1.2	Tenaga kerja kontrak PKP2A IV LAN Aceh menerima upah tidak sesuai UMP Provinsi Aceh dan menanggung seluruh luran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
1.3	Sistem pengendalian beban operasional pada penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas belum sepenuhnya memadai
1.4	Sistem pengendalian aset terdapat penyetoran Kas oleh Bendahara Penerimaan pada PKP2A IV LAN Aceh melebihi satu hari kerja minimal penyetoran
1.5	Persediaan obat-obatan pada LAN Jakarta belum dilengkapi dengan kartu Persediaan
1.6	Terdapat aset LAN berupa Tanah yang belum bisa memanfaatkan karena masih dipakai pihak ketiga
1.7	Penatausahaan peralatan dan mesin belum tertib
1.8	Penatausahaan Koleksi Buku Hibah/Sumbangan belum memadai
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Pendapatan seminar proposal mahasiswa Program Sarjana Tahun 2016 sebesar Rp30.600.000 (30,6 juta) tidak dapat terealisasi
2.2	Belanja pekerjaan rehabilitasi dan perluasan tempat ibadah tidak sesuai dengan surat perjanjian sebesar Rp58.880.000 (58,88 juta)
2.3	Realisasi Belanja Barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.490.000 (60,49 juta)
2.4	Aset tetap berupa tanah LAN di Pejompongan dimanfaatkan penghuni sebagai kegiatan komersial
2.5	Pernmasalahan Aset Tanah belum dapat diselesaikan PKP2A II LAN Makassar

Berdasarkan telaah LHP BPK atas Laporan Keuangan LAN, temuan SPI No. 1.6 dan Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 2.4 yang menyangkut kekayaan Aset Tetap LAN yang belum bisa optimal dimanfaatkan:

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK ORI dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK ORI dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
TMP

2015  
WDP

BPK memberikan Opini TA 2016:

**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

Ket: 3 tahun mengalami peningkatan Opini  
BPK (TMP, WDP, dan 2016 WTP)

## Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 2.525.805.027,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 170.056.252.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 126.143.918.276,00 (74,18%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 27.696.473.536,00
- **Kewajiban**  
Rp 2.004.273.670,00
- **Ekuitas**  
Rp 25.692.199.866,00

### Kepatuhan Perundang-undangan **6 Temuan**

- Kerugian Negara  
Rp 675.630.000,00

60%

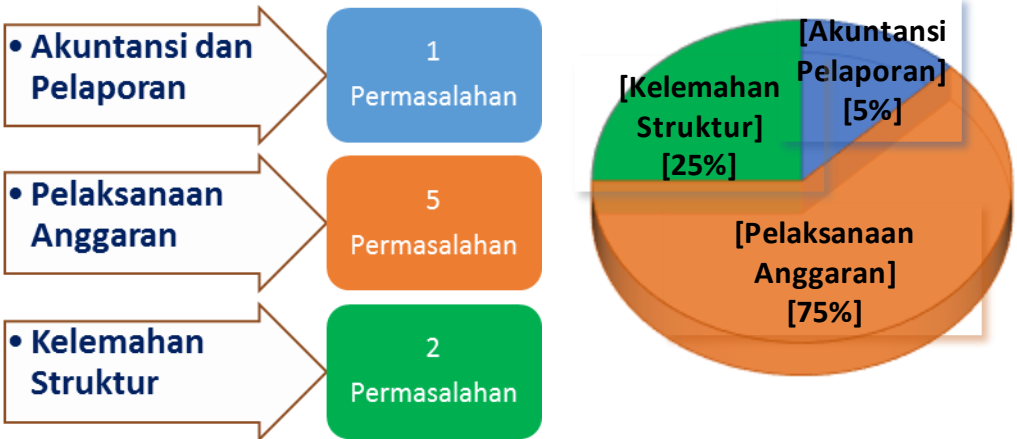
40%

### Sistem Pengendalian Intern **4 Temuan**

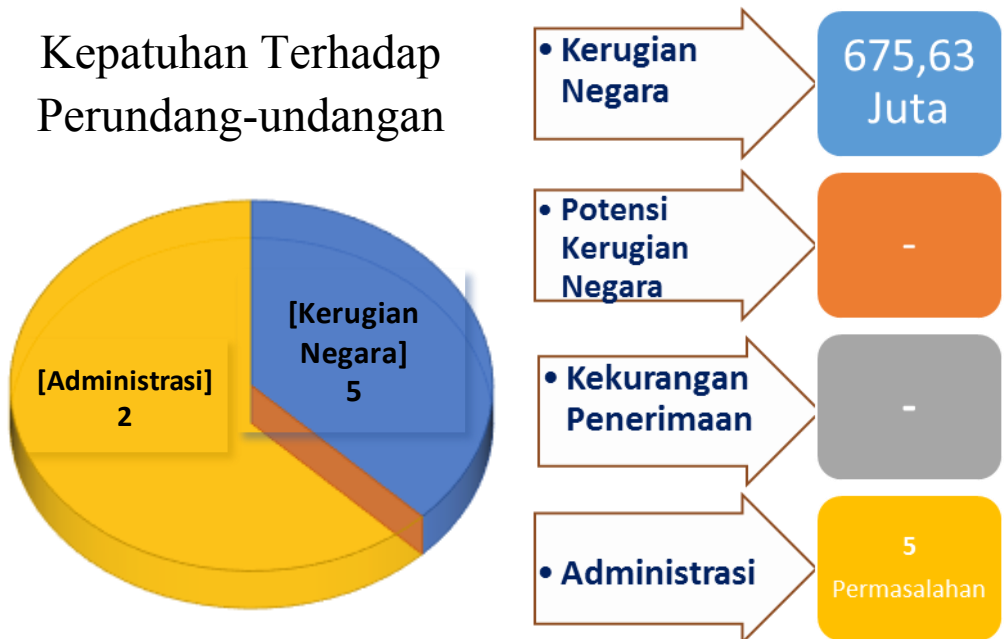


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Ombudsman R.I (ORI) Tahun Anggaran 2016 BPK mencatat terdapat beberapa temuan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pengendalian belanja berupa belanja barang berupa sewa rumah senilai Rp114.250.000 (114,25 juta) tidak diyakini kewajarannya
1.2	Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp123.020.000 (123,02 juta) tidak sesuai ketentuan
1.3	Pelaksanaan kegiatan investigasi atas dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum didukung <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP)
1.4	Sistem pengendalian aset, pada pengelolaan persediaan belum tertib
1.5	Sistem pengendalian bukti kepemilikan Barang Nilik Negara (BNM) pada ORI masih atas nama pihak lain
1.6	Pengelolaan atas pangakuan dan pembayaran hutang kepada pihak ketiga belum memadai
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Kelebihan pembayaran Insentif Asisten sebesar Rp613.400.000
2.2	Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar Rp45.370.000
2.3	Penagihan biaya non personil jasa perencanaan tidak disertai bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres No. 70 tahun 2012
2.4	Pelaksanaan kegiatan pekerjaan renovasi gedung ORI tidak sesuai kontrak

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang bersifat material, signifikan dan menyangkut kerugian negara. Berdasarkan telaah LHP BPK atas Laporan Keuangan ORI, temuan SPI No 1.3 Pelaksanaan kegiatan investigasi atas dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum didukung *Standard Operating Procedures* (SOP). hal ini perlu diungkap mengingat tugas utama ORI adalah menjamin kepastian penyelenggaraan publik:

# HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIS KABINET TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Sekretaris Kabinet (Seskab) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Seskab dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Seskab dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014  
WTP

2015  
WTP

BPK memberikan Opini TA 2016:  
**Wajar Tanpa Pengecualian  
(WTP)**

## Laporan Realisasi Anggaran

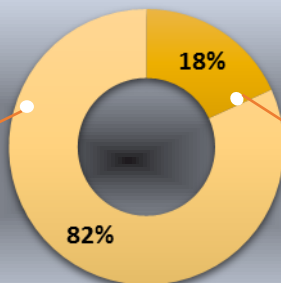
- **Pendapatan (PNBP)**  
Rp 262.188.434,00
- **Anggaran Belanja**  
Rp 210.247.364.000,00
- **Realisasi Belanja**  
Rp 182.898.615.866,00 (86,75%)

## NERACA

- **Aset**  
Rp 16.754.0401.174,00
- **Kewajiban**  
Rp 3.944.275.648,00
- **Ekuitas**  
Rp 12.810.125.526,00

## Kepatuhan Perundang-undangan 6 Temuan

- Kerugian Negara  
Rp 525.270.000,00
- Kekurangan Penerimaan  
Rp 21.490.000,00

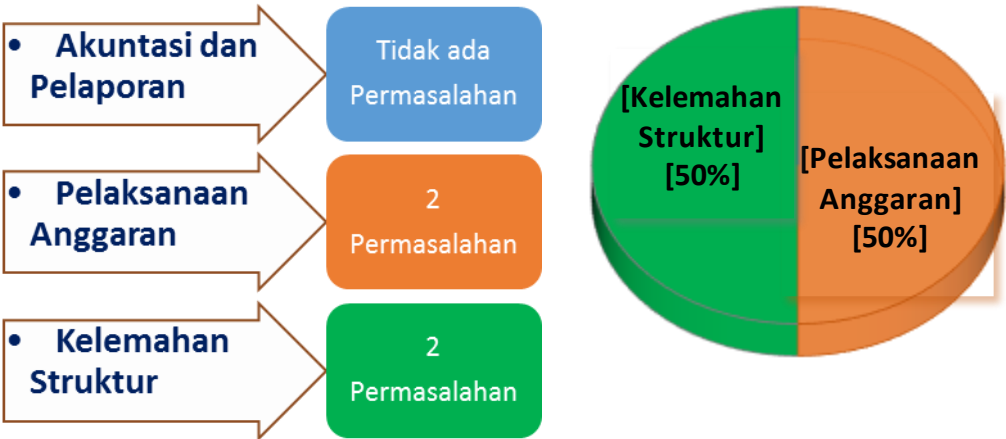


## Sistem Pengendalian Intern 2 Temuan

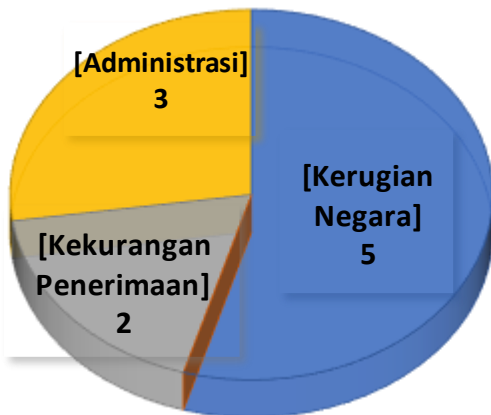


# PERMASALAHAN

## Sistem Pengendalian Intern



## Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Seskab Tahun Anggaran 2016 BPK mencatat terdapat beberapa temuan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
1	SISTEM PENGENDALIAN INTERN
1.1	Sistem pengendalian belanja, terdapat sewa <i>virtual Private Server</i> yang belum dimanfaatkan secara efektif
1.2	Sistem pengendalian aset, terdapat keterlambatan penyetoran Kas TUP sebesar Rp451.650.000
2	KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.1	Kelebihan pembayaran biaya instalasi Zimbra NE sebesar Rp48.000.000
2.2	Penyelenggaraan Rapat Dalam Kantor (RDK) tidak sesuai PMK No.65 Tahun 2015
2.3	Pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja
2.4	Pelaksanaan beberapa perjalanan dinas di Seskab tidak sesuai dengan ketentuan
2.5	Terdapat selisih harga pengadaan buku perpustakaan dari harga kontrak sebesar Rp16.030.000
2.6	Pelaksanaan paket pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian tidak sesuai dengan surat perjanjian

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dibatasi pada temuan-temuan yang bersifat material, signifikan dan menyangkut kerugian negara. Berdasarkan telaah LHP BPK atas Laporan Keuangan Seskab, temuan SPI No 1.1 Sistem pengendalian belanja, No 1.3 terkait pengendalian aset: